

“Banking” Weekly Hotlist

(3 Juli – 7 Juli 2017)

KEBIJAKAN MONETER

BI: GWM Averaging Cegah Bubble Likuiditas

Bank Indonesia (BI) mengakui, adanya risiko menggelembungnya (bubble) likuiditas. Maka dari itu bank sentral terus mengeluarkan instrumen moneter, sehingga diharapkan akan mengurangi risiko pengetatan likuiditas pada perbankan. Adapun instrumen moneter yang dilakukan BI yakni melalui penerapan Giro Wajib Minimum yang wajib dipenuhi secara rata-rata (GWM Averaging). Pasalnya, GWM Averaging dapat menjadi fasilitas likuiditas tambahan bagi bank untuk meningkatkan penyaluran kredit.

Sebagai informasi BI telah menyempurnakan aturan GWM terkait pemenuhan GWM Primer dalam rupiah yang dipenuhi secara harian sebesar 5 persen dari DPK dan GWM yang wajib dipenuhi secara rata-rata (GWM Averaging) sebesar 1,5 persen dari DPK dalam rupiah selama periode tertentu. Adapun ketentuan GWM Averaging ini berlaku mulai 1 Juli 2017 dengan masa transisi selama 1 bulan. Dengan adanya kebijakan ini, maka akan memberikan fleksibilitas bagi perbankan dalam mengelola likuiditasnya. Di sisi lain, penerapan GWM Averaging ini, akan membuat sistem moneter semakin baik.

Penyempurnaan aturan GWM Primer tersebut dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.19/6/PBI/2017 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional.

(Sumber: Infobank.com, 3 Juli 2017)

BI Tunggu Kesiapan Bank Terapkan Penuh GWM Averaging

Bank Indonesia akan mengevaluasi hasil penerapan Giro Wajib Minimum secara rata-rata (GWM Averaging) pada tahap awal ini. Jika perbankan sudah memiliki manajemen likuiditas yang baik, bukan tidak mungkin perhitungan rata-rata akan diterapkan pada seluruh rasio GWM.

Penerapan GWM Averaging ini masih dalam tahap awal dengan komponen yang dihitung secara rata-rata sebesar 1,5 persen dari total rasio GWM Primer sebesar 6,5 persen. Perhitungan rata-rata ini dilakukan setiap dua pekan. Sementara sisanya yakni 5 persen masih harus dipenuhi dengan skema tetap (fixed) dan dihitung setiap akhir hari.

Meskipun GWM Averaging baru diterapkan sebagian (parsial) pada total kewajiban GWM Primer, setidaknya bank dapat menyisihkan sebagian dari GWM nya untuk ditempatkan di instrumen keuangan lain dengan bunga yang lebih tinggi. Jadi, bank tidak perlu terlalu sering masuk ke pasar uang dan meminjam dana.

Penerapan GWM Averaging ini akan memberikan fleksibilitas kepada bank untuk mengelola likuiditasnya. Porsi 1,5 persen dari total GWM-Primer yang hanya dihitung secara rata-rata dan setiap akhir pekan, diharap dapat dialirkan oleh bank untuk membeli surat utang di pasar atau meminjamkannya ke bank-bank kecil di pasar uang antar bank (PUAB). Dengan bertambahnya likuiditas di PUAB, maka bunga pinjaman pendanaan antar bank juga akan menurun. Sehingga hal itu akan meringankan biaya dana perbankan, yang pada akhirnya akan dapat memberikan peluang bagi bank untuk menurunkan bunga pinjaman.

(Sumber: Infobank.com, 4 Juli 2017)

Bankir Sambut Positif Implementasi GWM Averaging

Sejumlah bankir menanggapi positif penerapan aturan Giro Wajib Minimum secara rata-rata (GWM Averaging) oleh Bank Indonesia (BI). Penerapan aturan ini dinilai memberi keleluasaan bagi bank dalam mengelola likuiditasnya karena dana yang disimpan di bank sentral tidak dihitung harian.

“Aturan ini membuat bank lebih mudah mengelola kebutuhan likuiditasnya. Syaratnya bank harus mampu menyediakan simpanan dana di BI sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Jadi

yang penting average-nya terpenuhi, kalau punya GWM tinggi itu bisa digunakan karena yang dipakai hanya average-nya saja. Artinya itu memberi kelonggaran likuiditas. Dengan kemudahan tersebut maka bank bisa menjalankan bisnisnya lebih leluasa. Namun demikian, belum bisa diprediksi besaran tambahan dana yang bisa masuk ke dalam sistem keuangan". (Sunarso, Wakil Direktur Bank Rakyat Indonesia)

"GWM Averaging bagus. Itu membantu perbankan untuk lebih mudah dalam mengelola likuiditasnya. Kami di BCA pastinya akan memanfaatkan itu, kita akan pakai sesuai dengan aturan GWM averaging yang baru". (Jahja Setiaatmadja, Presiden Direktur Bank Central Asia)

Menurut BI, implementasi GWM Averaging ini sebagai langkah lanjutan dari Reformulasi Kerangka Operasional Kebijakan Moneter dalam meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter. Kebijakan ini juga sesuai dengan standar internasional. Pengalaman di berbagai negara menunjukkan bahwa sistem GWM Rata-Rata ternyata mampu memberikan fleksibilitas dan meningkatkan efisiensi pengelolaan likuiditas bank (Liquidity Management Instrument) dan mengurangi volatilitas suku bunga di pasar uang (Interest Rate Buffer).

Penerapan GWM Rata-Rata membuka ruang bagi bank untuk meningkatkan kemampuan dan efisiensi pengelolaan likuiditas. Bank dapat memanfaatkan fleksibilitas likuiditas tersebut untuk penempatan sementara pada instrumen pasar uang sehingga akan semakin mendorong pendalaman pasar keuangan yang merupakan salah satu program strategis BI. Implementasi GWM Rata-Rata juga dapat menopang stabilitas suku bunga operasional (PUAB overnite) berada di kisaran suku bunga kebijakan 7-Days (Reverse) Repo Rate sebagai sasaran operasional kebijakan moneter dan sekaligus mendorong pendalaman pasar keuangan.

(Sumber: Infobank.com, 4 Juli 2017)

SISTEM PEMBAYARAN

BI Bagi Tiga Lembaga Penyelenggara NPG

Bank Indonesia telah menerbitkan aturan mengenai Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) atau National Payment Gateway (NPG) yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.19/8/PBI/2017. Dalam aturan ini, Bank Sentral membagi 3 (tiga) lembaga penyelenggara

NPG. Tiga lembaga penyelenggara NPG tersebut yaitu lembaga standar, lembaga switching (pengalih/operator) dan juga lembaga servis. Tiga lembaga penyelenggara ini memiliki peran masing-masing dalam menjalankan NPG. Lembaga standar, tugasnya membuat koridor dan memastikan kepatuhan pihak-pihak yang terlibat dalam sistem pembayaran nasional. Lembaga standar ini, akan mendapat status penetapan dari BI. Kemungkinan besar, lembaga standar ini merupakan asosiasi di sistem pembayaran Indonesia (ASPI).

Sedangkan lembaga switching, status izin lembaga ini berbeda dengan dua lembaga lainnya, karena lembaga ini harus mendapat persetujuan dari BI. Lembaga ini juga yang bertanggung jawab terhadap pengalihan transaksi pembayaran dan merekam data-data transaksi yang telah dilakukan masyarakat. Lembaga switching akan berperan sebagai pihak yang memproses sistem pembayaran di dalam negeri. Di mana, sebelum adanya NPG, pengalihan transaksi pembayaran yang menggunakan prinsipal kartu pembayaran asing seperti Master Card dan Visa dilakukan di luar negeri. Saat ini, di Indonesia sendiri ada 4 (empat) perusahaan switching. Namun baru satu perusahaan yang sudah mendapatkan izin untuk integrasi ATM/Debet yakni PT. Jalin Pembayaran Nusantara (JPN) yang dimiliki oleh Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA)

Sementara yang terakhir, yakni lembaga servis adalah pihak yang akan menyelesaikan setelmen (penuntasan) transaksi pembayaran. Lembaga servis ini juga yang akan bertanggung jawab dengan keamanan transaksi pembayaran. Lembaga servis ini perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan switching dan Bank-Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) IV.

Selain tiga lembaga penyelenggara NPG tersebut, akan terdapat juga perusahaan yang terhubung dengan NPG yakni penerbit, pengelola transaksi pembayaran (acquirer), penyelenggara sistem pembayaran dan pihak-pihak lain yang telah ditetapkan oleh BI.

Dengan adanya NPG ini, diharapkan akan mendorong pembentukan lembaga-lembaga penyelenggara transaksi pembayaran domestik, sehingga akan meningkatkan efisiensi biaya, dan juga sekaligus akan mengurangi ketergantungan terhadap perusahaan asing.

NPG merupakan sebuah sistem yang terdiri atas Standar¹, Switching², dan Services³ yang dibangun melalui seperangkat aturan dan mekanisme untuk mengintegrasikan berbagai instrumen dan kanal pembayaran secara nasional. Melalui NPG, pemrosesan transaksi pembayaran ritel domestik akan dapat dijalankan dengan interkoneksi dan interoperabilitas.

Adapun ruang lingkup NPG mencakup transaksi pembayaran secara domestik yang meliputi tiga hal yaitu, interkoneksi switching, interkoneksi dan interoperabilitas kanal pembayaran, dan interoperabilitas instrumen pembayaran.

(Sumber: infobank, 6 Juli 2017, 20)

PENGAWASAN PERBANKAN

OJK: Bank Ajukan Revisi RBB Lebih Optimis

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melihat, industri perbankan nasional akan mengajukan revisi Rencana Bisnis Bank (RBB) di awal Semester II ini lebih optimistis bila dibandingkan dengan RBB yang diajukan perbankan pada awal tahun 2017 ini. Keoptimisan perbankan dalam pengajuan revisi target kinerja yang tertuang dalam RBB tersebut sejalan dengan terus membaiknya permintaan atau *demand* kredit. Kondisi ini juga seiring dengan adanya pengerjaan proyek-proyek infrastruktur nasional.

Memasuki Semester II tahun ini, OJK akan fokus pada realisasi penyaluran kredit perbankan yang ditargetkan dapat tumbuh pada kisaran 10-12 persen di 2017. Namun demikian, akan tetap mewaspadai kondisi global yang dikhawatirkan akan berdampak pada perbankan. Terlebih jika Bank Sentral AS (The Fed) kembali menaikkan suku bunga, bukan tidak mungkin Bank Indonesia juga akan ikut meresponnya melalui kebijakan suku bunga acuannya.

(Sumber: Infobank.com, 4 Juli 2017)

KINERJA PERBANKAN

Interkoneksi Perbankan: Menakar Efisiensi pada Bank Kecil

Bank Indonesia berencana mewajibkan bank bekerjasama dengan setidaknya 2 perusahaan *switching* dalam kerangka *national payment gateway*. Dengan kewajiban itu apakah bank, terutama bank kecil dan menengah, akan semakin efisien?

Sistem *national payment gateway* dirancang untuk membuat perbankan di Indonesia kian efisien. Efisiensi diharapkan terjadi karena adanya interkoneksi dan interoperabilitas antarlembaga antarlembaga *switching*, sehingga menekan biaya operasional. Di Indonesia, saat ini ada empat perusahaan *switching* yakni, PT Rintis Sejahtera, PT Artajasa Pembayaran Elektronik, PT Daya Network Lestari (ALTO) dan PT Jalin Pembayaran Nusantara. Bank Indonesia menyatakan, dalam proses menuju NPG, BI akan memanfaatkan keempat perusahaan *switching* tersebut. Dalam prosesnya, akan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi terkait kemampuan dan pengalaman yang memadai. Tujuannya agar tidak merugikan masyarakat dan bisa berjalan aman, efisien dan lancar.

BI akan mewajibkan bank untuk minimal bekerjasama dengan dua perusahaan *switching*. Perusahaan pertama untuk melakukan transaksi sehari-hari, sedangkan perusahaan kedua untuk cadangan apabila perusahaan pertama sedang bermasalah. Namun, rencana ini dinilai berpotensi memberikan dampak positif dan negatif ke perbankan. Khususnya, kepada bank kecil dan menengah yang rasio tingkat transaksi tidak sebesar bank besar.

“Dengan pertimbangan bisnis, bank bisa saja mendapatkan manfaat dari bekerja dengan lebih dari satu perusahaan *switching*. Justru dengan menuju NPG, bank cukup bekerja sama dengan satu perusahaan *switching* saja. Bekerja sama dengan lebih dari satu perusahaan *switching* berarti akan ada tambahan dari segi operasional”. (Direktur Utama PT Bank Ina Perdana Tbk., Edy Kuntardjo).

(Sumber: Bisnis Indonesia, 3 Juli 2017, 16)

Kolektibilitas Pembiayaan: Kualitas Kredit Membaik

Meskipun sempat diwarnai fluktuasi sejak awal tahun, OJK memproyeksikan rasio kredit bermasalah membaik hingga akhir tahun karena ada perbaikan di sisi pembiayaan dan kolektibilitas. Selain didorong oleh penyaluran kredit yang lebih tinggi, rasio kredit bermasalah atau NPL juga membaik karena proses restrukturisasi yang terus berjalan.

Berdasarkan data Statistik Perbankan Indonesia (SPI), rasio NPL per April tercatat di level 3,07%, naik 0,03% dibandingkan dengan periode akhir kuartal I/2017 yang berada di level 3,04%.

Sejumlah bankir optimistis rasio kredit bermasalah hingga akhir tahun ini akan semakin membaik, bahkan lebih baik dibandingkan dengan kondisi pada akhir 2016 yang sebesar 2,93%.

(Sumber: Bisnis Indonesia, 15 Desember 2014, 24)

Tren Penurunan Suku Bunga Kredit Berlanjut, Jadi 11,83%

Bank Indonesia mencatat, tren penurunan suku bunga kredit dan suku bunga simpanan masih berlanjut. Pada Mei 2017, rata-rata suku bunga kredit tercatat 11,83 persen, atau turun bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya yakni 11,92 persen. Di sisi lain, suku bunga simpanan dengan tenor 3 dan 24 bulan masing-masing tercatat 6,62 persen dan 6,97 persen, turun dibandingkan bulan sebelumnya masing-masing sebesar 6,64 persen dan 7,02 persen. Sedangkan suku bunga simpanan dengan tenor 1 bulan tidak mengalami perubahan dibanding bulan sebelumnya yakni 6,37 persen.

Sementara itu, untuk suku bunga berjangka dengan tenor 6 dan 12 bulan tercatat sebesar 7,03 persen dan 7,11 persen, atau meningkat dibandingkan bulan sebelumnya masing-masing sebesar 7,02 persen dan 7,10 persen. Tren suku bunga kredit dan suku bunga simpanan yang tercatat menurun di Mei 2017 tersebut, telah memengaruhi akselerasi pertumbuhan likuiditas

perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) yang mengalami pertumbuhan lebih tinggi bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Pertumbuhan M2 meningkat pada Mei 2017. Posisi M2 sebesar Rp5.126,2 triliun atau tumbuh 11,1 persen (year-on-year/yoy). Pertumbuhan M2 di Mei 2017 ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 10,2 persen (yoy). Berdasarkan komponennya, peningkatan pertumbuhan M2 bersumber dari komponen uang kuasi dan surat berharga selain saham yang masing-masing tumbuh 10 persen (yoy) dan 43,2 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan bulan April 2017 yang masing-masing sebesar 8,7 persen (yoy) dan 30 persen (yoy).

Peningkatan pertumbuhan M2 juga disebabkan oleh peningkatan Aktiva Luar Negeri Bersih dan ekspansi operasi keuangan Pemerintah Pusat (Pempus). Pada Mei 2017, Aktiva Luar Negeri Bersih tercatat Rp1.447 triliun atau tumbuh 24,4 persen (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan April 2017 sebesar 20,5 persen (yoy).

(Sumber: Infobank.com, 4 Juli 2017)

Suku Bunga Kredit: Persaingan Semakin Ketat

Persaingan antar bank yang semakin ketat memaksa suku bunga kredit perbankan terus bergerak turun meskipun di sisi lain suku bunga simpanan masih fluktuatif. Berdasarkan informasi dari Bank Indonesia, suku bunga kredit sejak awal tahun terus menurun, melanjutkan tren sejak 2014. Pada akhir 2014, rata-rata suku bunga kredit perbankan berada pada level 12,96%, kemudian menurun menjadi 12,83% dan 12,03% pada dua tahun berikutnya. Demikian pula, sejak awal tahun, tren suku bunga kredit semakin menurun secara bertahap. Pada Mei 2017, suku bunga kredit perbankan berada pada level 11,83%.

Menurut Parwati Surjaudjaja, Presiden Direktur PT Bank OCBS NISP Tbk., bahwa terjadi kompetisi dalam penyaluran kredit sehingga menyebabkan suku bunga kredit cenderung menurun sejak awal tahun ini. Selain suku bunga kredit, bunga simpanan terutama deposito juga relatif menurun meskipun penurunannya tidak merata untuk seluruh tenor. Kendati sama-sama menurun, penurunan bunga kredit masih lebih besar dibandingkan dengan penurunan

bunga simpanan, sehingga mengakibatkan penurunan margin bunga bersih (net interest margin/NIM) yang diterima oleh perbankan.

Persaingan yang ketat dalam penyaluran kredit juga diakui oleh Direktur Utama PT Bank Mayapada International Tbk. Haryono Tjahrijadi sebagai salah satu penyebab utama penurunan suku bunga kredit perbankan. Penurunan suku bunga kredit yang diberikan oleh setiap bank berbeda-beda, tergantung pada kondisi debitur. Semakin bagus kualitas debitur, bank berani menawarkan suku bunga kredit yang lebih rendah daripada yang berlaku umum di pasar.

(Sumber: Bisnis Indonesia, 6 Juli 2017, 16)

Kredit Perbankan: Pertumbuhan Terlambat Karena Pola Konsumsi

Likuiditas perbankan pasca-Lebaran kembali normal. Kondisi likuiditas tersebut ke depan juga cenderung terkendali karena daya beli masyarakat cenderung stagnan. Hal itu ditunjukkan dengan total likuiditas harian yang diproyeksikan Bank Indonesia (BI) pada Rabu sebesar Rp 166,78 triliun. Posisi likuiditas itu lebih tinggi dibandingkan posisi likuiditas sebelum Lebaran, yaitu pada 19 dan 20 Juni yang masing-masing sebesar Rp 72 triliun dan Rp 87 triliun. Likuiditas selama periode Lebaran itu turun karena ada aliran keluar uang kartal dan giro bank yang lebih tinggi dibandingkan ekspansi bersih keuangan pemerintah dan transaksi BI lainnya. Membaiknya kondisi likuiditas juga terindikasi dari suku bunga pasar uang antarbank (PUAB) yang sempat meningkat menjadi 4,96 persen pada 22 Juni, kemudian turun menjadi 4,35 persen pada penutupan Selasa lalu,

Dengan kondisi likuiditas yang stabil dan terjaga baik, perbankan tidak serta-merta dapat menyalurkan kredit secara optimal. Hal itu terjadi karena daya beli masyarakat cenderung lemah akibat perubahan konsumsi masyarakat sejak awal tahun. Permintaan juga tidak terlalu signifikan meningkat pada Ramadhan-Lebaran tahun ini. Hal itu karena masyarakat menunda konsumsi secara berlebihan selama Ramadhan-Lebaran lalu. Penundaan itu karena ada ekspektasi tekanan inflasi pada semester II tahun ini, ada tahun ajaran baru sekolah, dan

potensi pemangkasan subsidi elpiji serta ekspektasi inflasi yang meningkat pada akhir tahun menjelang Natal dan tahun baru.

Defisit fiskal

Untuk menambal defisit fiskal, pemerintah harus menerbitkan lebih banyak surat utang sehingga terjadi peralihan dari dana deposito ke surat utang negara. Hal itu akan berpengaruh negatif pada likuiditas perbankan. Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara mengemukakan, pada periode Ramadhan-Lebaran tahun ini penarikan dana tunai di perbankan diperkirakan sebesar Rp 167 triliun. Masyarakat mengambil dana simpanannya sehingga bank membutuhkan tambahan likuiditas. Sama seperti periode tahun lalu, BI menambah likuiditas di pasar keuangan dengan cara melakukan term repo dengan tenor dua minggu. Dengan menggunakan jaminan SBN atau surat berharga BI, bank mendapatkan tambahan likuiditas dari BI. Total tambahan likuiditas yang dikeluarkan BI sebesar Rp 33 triliun. Setelah periode itu tuntas, likuiditas bank akan kembali normal. Di samping itu, BI mulai memberlakukan giro wajib minimum rata-rata per 1 Juli lalu. Melalui kebijakan itu, perbankan akan semakin leluasa mengelola likuiditas dan menambah pendapatan dengan menempatkan sebagian likuiditasnya di instrumen lain, terutama yang berjangka panjang.

(Sumber: Kompas, 6 Juli 2017, 20)
